



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DARWIN ROMY SJAHRAIN
2. Jabatan : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 492190

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m²/215 m² di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/112 m² di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 5625 m² di KAB / KOTA GORONTALO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 3422 m²/120 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 2635 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 1971 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Tanah Seluas 2325 m² di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 112.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G/MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.916



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.251.374.916
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.251.374.916

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.